



DJKN

KPKNL
PADANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KPKNL PADANG
TAHUN 2022



Jl. Perintis Kemerdekaan No.79, Padang Timur – Kota Padang, Sumatera Barat Telp. (0751) 21306
Fax. (0751) 21306



LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
TAHUN ANGGARAN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	lii
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi	1
Peran Strategis Organisasi	5
Sistematika Laporan	7
Bab II Perencanaan Kinerja	9
Rencana Strategis	9
Penetapan/Perjanjian Kinerja	11
Pengukuran Kinerja	13
Perkembangan Implementasi Pengelolaan Kinerja	13
Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	14
Capaian Kinerja Organisasi	14
Kinerja Lainnya	45
Analisis Atas Pelaksanaan Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko	47
Rencana Aksi Atau Mitigasi Risiko Untuk Tahun 2022	47
Realisasi Anggaran	49
Bab IV Penutup	52
Lampiran	54

PENGANTAR

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2022, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

Hal tersebut mendasari penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2022 ini. LAKIN ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas KPKNL Padang kepada masyarakat atas segala pelayanan yang disediakan, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja yang tertuang ke dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Padang Tahun 2022. Penilaian kinerja KPKNL Padang telah menggunakan sistem *balance scorecard* (BSC) yang dinilai berdasarkan pencapaian IKU yang mewakili keberhasilan KPKNL Padang dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Padang dengan Menteri Keuangan.

Kami berharap dengan telah disusunnya LAKIN KPKNL Padang Tahun 2022 ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat akan visi, misi, program, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KPKNL Padang. Dengan *full disclosure* pada sasaran strategis dan IKU KPKNL Padang, dan dengan mengingat hakikat KPKNL Padang selaku instansi penyedia layanan publik, diharapkan tercipta suatu kontrol sosial atas kinerja KPKNL Padang yang pada

akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja dan performa serta pelayanan yang dapat kami berikan kepada masyarakat luas. Dengan dilandasi Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjunjung tinggi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan, serta dengan didorong oleh semangat *One Team, One Spirit, One goal*, KPKNL Padang selalu melakukan *continuous improvement* demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya ke dalam penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Padang,

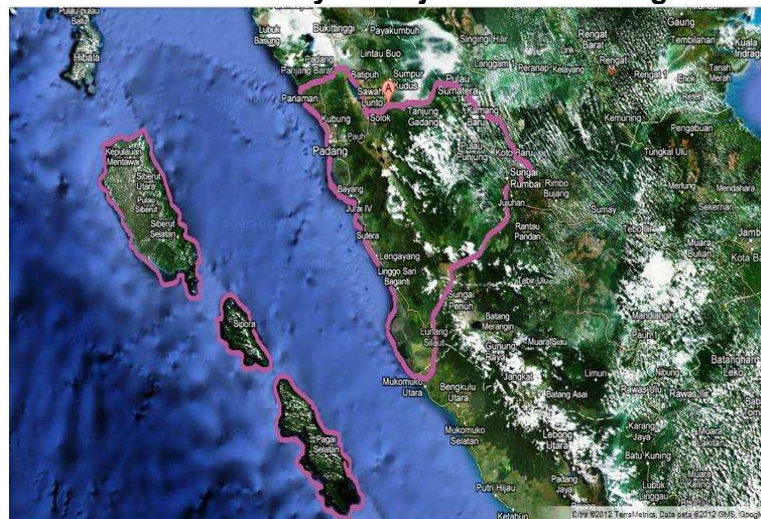
**Ahid Iwanudin
NIP 197102261998031001**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

KPKNL Padang merupakan kantor daerah yang merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang berada dibawah bimbingan Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. KPKNL Padang berkedudukan di kota Padang, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 yang wilayah kerjanya mencakup 11 kota/kabupaten disekitarnya. Kota/Kabupaten tersebut yaitu: Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Gambar 1 Wilayah Kerja KPKNL Padang



LAKIN 2022 ini disusun untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terkait kinerja KPKNL Padang sekaligus memenuhi asas akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan negara yang baik. LAKIN berfungsi sebagai tolak ukur kinerja secara kuantitatif serta menyediakan peran kontrol sosial akan kinerja KPKNL Padang. Penyusunan LAKIN 2022 ini didasarkan pada

Rencana Strategis 2020-2024 serta kontrak kinerja KPKNL Padang yang telah mencakup penilaian kinerja serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat turut mengawasi dan memonitor kinerja KPKNL Padang.

Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL Padang memiliki fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Sejalan dengan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sesuai dengan visi dan misi KPKNL Padang, telah dirumuskan sasaran strategis yang kemudian dirinci secara mendetail ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis dan IKU tertuang

secara kuantitatif di dalam kontrak kinerja yang memudahkan proses penilaian. Penilaian terhadap IKU dilakukan secara sistematis melalui *e-performance* yang pada akhirnya menunjukkan capaian kinerja KPKNL Padang.

Adapun sasaran strategis KPKNL Padang Tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Tertuang dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang dengan capaian 152,97 %;
2. Persentase Produktivitas Lelang dengan hasil yang dicapai adalah 57% dari target yang ditetapkan yaitu 36%.

Hal ini diperoleh dari kerjasama antar pejabat dan pegawai KPKNL Padang dan *stakeholder* terkait.

2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Tertuang dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase Realisasi Pokok Lelang dengan capaian 144%.
2. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara dengan capaian 167,74%;

3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Tertuang dalam IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL. Pada tahun 2022, KPKNL Padang ditargetkan memperoleh indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL minimal sebesar 4,46 (skala 5) dan pada akhir tahun anggaran KPKNL Padang memperoleh indeks kepuasan pengguna layanan sebesar 4,86. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang berkesinambungan dengan satuan kerja yang berada di wilayah kerja KPKNL Padang, baik secara *face to face* atau penggunaan sarana “Layanan APT Online”. *Continuous improvement* yang terus menerus dilakukan oleh seluruh pegawai KPKNL Padang diharapkan dapat selalu memenuhi harapan pengguna layanan KPKNL Padang.

4. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Tertuang dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK dengan capaian 74,58% dari target 65%;
2. Persentase Bidang tanah BMN yang disertipkatkan dengan hasil capaian adalah 71,55%;
3. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan capaian 117,86%;
4. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Potofilio Aset) dengan capaian akhir adalah 124,56%;

5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel

Diwakili oleh IKU Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian dengan capaian 1,61% dari target yang ditetapkan sebesar 19%. Persentase capaian tersebut sebesar 120%.

6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif

Tertuang dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Lelang *e-auction* dan *e-conventional auction* dengan hasil capaian sebesar 100%;
2. Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN dengan capaian 0,00% dari target yang ditetapkan 10%. Persentase capaian tersebut sebesar 120%.

7. Edukasi yang Efektif

Sasaran strategis ini diwakili oleh tingkat efektifitas edukasi dan komunikasi yang pada tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 92. KPKNL Padang berhasil membukukan capaian 96,65 dari target. Persentase capaian tersebut sebesar 105,05%. Persentase ini berkat usaha KPKNL Padang dalam mengedukasi pengguna jasa terkait *current Issue* dibidang kekayaan negara dan lelang melalui sosialisasi maupun konsultasi di area pelayanan kantor dan melalui media komunikasi lainnya seperti media cetak dan media sosial serta melalui portal/website KPKNL Padang.

8. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif

Sasaran strategis ini memiliki IKU Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan Negara dengan capaian 96,25% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Persentase capaian tersebut sebesar 113,24%.

9. SDM yang Kompeten

Sasaran strategis ini diidentifikasi oleh IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai baik *hard competency* maupun *soft competency*, dimana pada akhir tahun anggaran tercapai realisasi sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

10. Organisasi yang Fit For Purpose

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Nilai review pengelolaan kinerja dengan capaian sebesar 92,52 dari target yang ditetapkan sebesar 80. Persentase capaian ini sebesar 115,65%;
2. Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator dengan capaian sebesar 97,98 dari target yang ditetapkan sebesar 90. Persentase capaian ini sebesar 108,87%.

11. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Sasaran strategis ini diidentifikasi dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar 91,21% dari target 95,5%. Pada tahun 2022 realisasi anggaran adalah sebesar 96,28% atau sebesar Rp2.278.290.821 dari total pagu sebesar Rp2.366.295.000
2. Tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan dengan capaian sebesar 172% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pencapaian kinerja tahun 2022, KPKNL Padang masih memiliki banyak kekurangan, namun dengan sepenuh hati kami senantiasa berupaya dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dari segi kebijakan, standar prosedur operasi, maupun dalam pelaksanaan teknis di lapangan sehingga pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya dapat tercapai lebih optimal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Padang memiliki tugas dan fungsi yang merupakan perluasan fungsional dari instansi yang sebelumnya dikenal dengan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang (KP2LN) Padang, sebagai konsekuensi dari reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 berikut perubahannya dan Keputusan Presiden Nomor 95 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan.

Budaya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, dengan didasari semangat kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, diharapkan terinternalisasi ke dalam seluruh punggawa Kementerian Keuangan Republik Indonesia terutama pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang sebagai bentuk totalitas pengabdian kepada masyarakat. Menindaklanjuti urgensi penerapan asas *good governance* tersebut dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban APBD/ APBN.

Dengan berakhirnya Tahun 2022, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/ sasaran strategis instansi.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Padang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

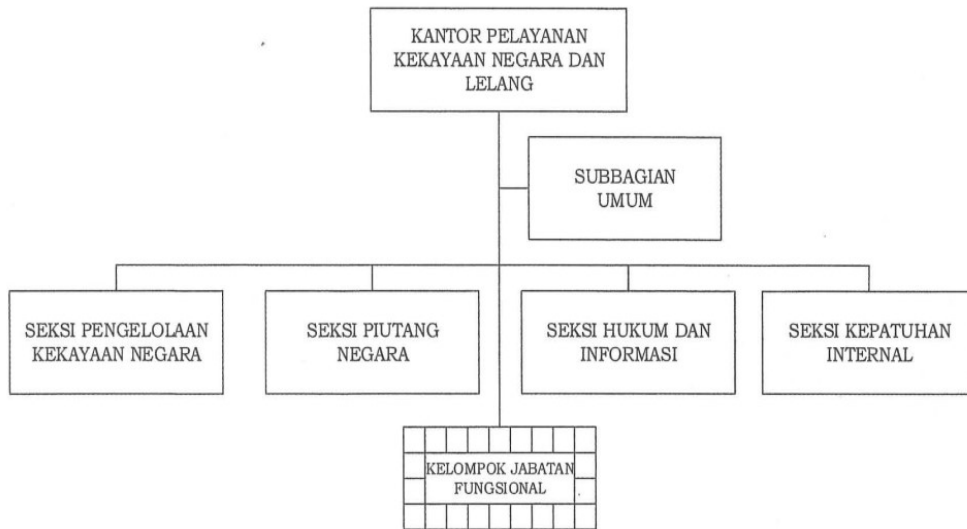
- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi, dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang Negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Padang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit Eselon IV dan 1 unit Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Sementara Struktur Organisasi KPKNL Padang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2 Bagan Organisasi KPKNL Padang



Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu tujuan dan sasaran. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh sumber daya manusia yang ada di KPKNL Padang. Berdasarkan Data per-31 Desember 2022 jumlah pegawai KPKNL Padang adalah 30 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

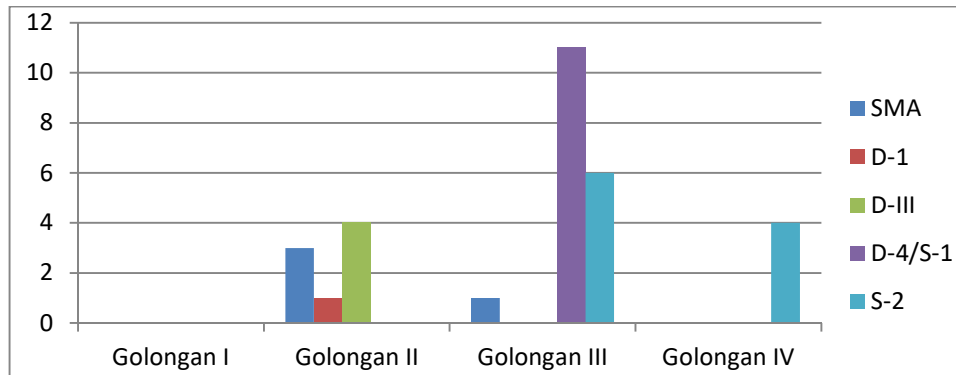
a. Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

Secara komposisi, pegawai KPKNL Padang terdiri dari pegawai lulusan Sarjana Strata 1 (S1) dengan jumlah 11 orang, dan pegawai lulusan SMA dengan jumlah 4 orang dengan 1 orang diantaranya menduduki golongan III. Sementara lulusan D-1 berjumlah 1 orang, lulusan D-III berjumlah 4 orang dan lulusan S2 berjumlah 4 orang, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
SMA	0	3	1	0	4
D-1	0	1	0	0	1
D-III	0	4	0	0	4
D-4 / S-1	0	0	11	0	11
S-2	0	0	6	4	10
TOTAL	0	8	18	4	30

Grafik 1



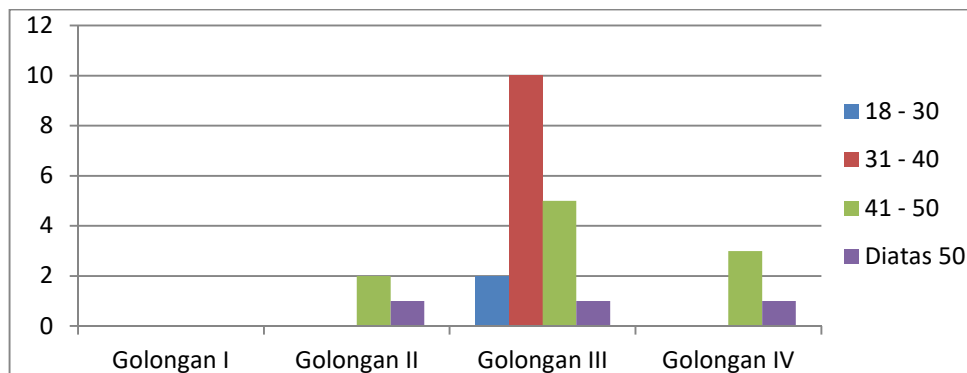
b. Berdasarkan Umur dan Golongan

Komposisi pegawai KPKNL Padang menunjukkan bahwa dalam waktu dekat, KPKNL Padang akan kehilangan banyak pegawai karena pensiun (usia di atas 50 tahun sejumlah 3 orang). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun berjumlah 7 orang, pegawai usia 31-40 tahun berjumlah 10 orang dan pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun berjumlah 10 orang

Tabel 2 Komposisi Pegawai Berdasar Kelompok Umur

UMUR	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
18-30	0	5	2	0	7
31-40	0	0	10	0	10
41-50	0	2	5	3	10
Diatas 50	0	1	1	1	3
TOTAL	0	8	18	4	30

Grafik 2



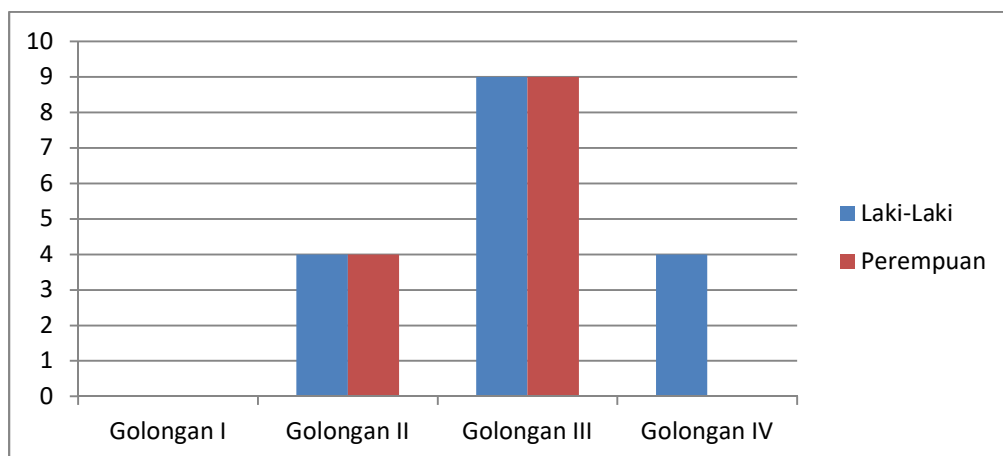
c. Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan golongan. Terlihat bahwa pegawai KPKNL Padang mayoritas berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 17 orang, dan 13 orang berjenis kelamin perempuan. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel seperti di bawah:

Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	GOLONGAN RUANG				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Laki-Laki	0	4	9	4	17
Perempuan	0	4	9	0	13
TOTAL	0	8	18	4	30

Grafik 3



d. Berdasarkan Jabatan Fungsional

Hingga saat ini KPKNL Padang memiliki pejabat fungsional pelelang sebanyak 4 orang dengan rincian pelelang ahli muda sebanyak 2 orang dan pelelang ahli pertama sebanyak 2 orang. KPKNL Padang juga memiliki pejabat fungsional penilai sebanyak 3 orang dengan rincian Penilai ahli pertama sebanyak 1 orang dan penilai ahli pertama sebanyak 2 orang. Selain itu, KPKNL Padang juga memiliki pejabat fungsional penata laksana barang sebanyak 1 orang.

C. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan Negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Padang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut:

a. Memberikan Pelayanan Lelang

KPKNL Padang sebagai Kantor pelayanan memberikan pelayanan lelang berupa penyediaan sarana transaksi penjualan secara umum. KPKNL Padang memberikan pelayanan lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi yang berasal dari instansi pemerintah, BUMN/D, swasta maupun masyarakat. Keuntungan melakukan penjualan dengan mekanisme lelang dibandingkan dengan transaksi jual biasa adalah jual beli melalui lelang bersifat lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang sebagai alat bukti otentik.

Permohonan lelang yang banyak diajukan ke KPKNL Padang selama tahun 2022 adalah Lelang Eksekusi Wajib Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerak dari kreditur/bank, sementara daya beli masyarakat atau swasta masih rendah dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang sulit sebagai dampak adanya pandemi covid-19 dan banyaknya gugatan atas lelang tersebut serta kesulitan untuk penguasaan barang setelah dibeli. Untuk mengatasi hal ini, Seksi Pelayanan lelang kembali melakukan penggalian potensi lelang ke berbagai instansi, masyarakat, BUMN/D dan swasta, melaksanakan lelang produk UMKM melalui program Kedai Lelang UMKM.

b. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Peran strategis KPKNL Padang dalam pelayanan pengurusan piutang negara adalah sebagai pihak yang melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Pada tahun 2022, dampak dari adanya bencana non alam yakni pandemi COVID-19 mulai berkurang. Debitur mulai bisa melakukan pembayaran angsuran maupun pelunasan terhadap piutangnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan BIAD seperti melakukan penelitian lapangan secara langsung. KPKNL Padang juga telah berupaya mendorong para debitur untuk memanfaatkan program keringanan hutang (crash program) dengan berbagai potongan pembayaran berdasarkan waktu pelunasan hutang.

c. Melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara

KPKNL Padang memiliki peran strategis untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan negara untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Padang telah melakukan penatausahaan BMN pada satuan kerja dalam program portofolio aset dan SBSK sebagai tindak lanjut penatausahaan BMN yang tertib dan optimal. Di samping itu, seksi pengelolaan kekayaan negara bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mensertipikatkan tanah sejumlah 694 bidang yang tersebar dalam 8 kabupaten/kota di wilayah kerja KPKNL Padang.

d. Melakukan Penilaian Kekayaan Negara

KPKNL Padang mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan barang milik negara lainnya yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga. Penilaian juga dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

e. Memberikan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara

KPKNL Padang memperoleh hasil berupa biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Bea Lelang yang disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak juga diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dengan pihak ketiga, dimana satuan kerja menyetorkan sendiri ke Kas Negara sesuai dengan persetujuan pengelolaan BMN yang diterbitkan KPKNL Padang mendukung tujuan DJKN sebagai *Distinguished Asset Manager*.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian LAKIN KPKNL Padang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif;

Memuat visi, misi, sasaran strategis, dan gambaran umum KPKNL Padang, serta capaian-capaian yang berhasil dibukukan oleh KPKNL Padang selama tahun 2022.

Bab I Pendahuluan;

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi Organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja;

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022, rencana strategis dan visi misi KPKNL Padang, kontrak kinerja serta langkah yang dilakukan KPKNL Padang untuk mencapai tujuannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja;

Pada bab ini berisi Sub bab Capaian Kinerja Organisasi dan Sub bab Realisasi Anggaran. Pada Sub bab Capaian Kinerja Organisasi disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Adapun pada Sub bab Realisasi Anggaran diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab VI Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat koordinatif dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan strategis KPKNL Padang disusun sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana strategi disusun agar pelaksanaan tugas pokok fungsi KPKNL Padang sebagai instansi pelayanan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang adalah: *“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat.”*

Visi tersebut mengandung pesan bahwa KPKNL Padang sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma, waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat melalui: (i) optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, (ii) peningkatan pembiayaan dalam negeri, serta (iii) integrasi pengelolaan kekayaan negara dengan penganggaran.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan arah gerak serta batasan lingkup kinerja KPKNL Padang yang tertuang dalam misi yaitu:

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah

- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- f. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, efisien, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat

SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan (dapat juga periodic triwulanan/semesteran/bulanan) yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sedangkan Sasaran Strategis dirumuskan sebagai target yang ingin dicapai pada waktu yang telah ditetapkan.

Terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) KPKNL Padang yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif, sebagai berikut:

- I. Stakeholder perspective
 - 1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian
- II. Customer perspective
 - 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa
 - 2) Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi
- III. Internal process perspective
 - 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal
 - 2) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
 - 3) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
 - 4) Edukasi yang Efektif
 - 5) Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
- IV. Learning & growth perspective
 - 1) SDM yang Kompeten
 - 2) Organisasi yang Fit For Purpose

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian 11 (sebelas) sasaran strategis tersebut, KPKNL Padang menetapkan indikator sasaran, yang disusun sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai. Adapun IKU Kepala KPKNL Padang selaku Pemilik Peta Strategis adalah sebagai berikut:

1. Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
2. Persentase produktivitas lelang
3. Persentase Realisasi Pokok Lelang
4. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
5. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL
6. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK
7. Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan
8. Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)
9. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
10. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
11. Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction
12. Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN
13. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
14. Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara
15. Persentase pengembangan kompetensi pegawai
16. Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja
17. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator
18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran
19. Persentase Pengelolaan BMN dan Pengadaan

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. KPKNL Padang telah menetapkan target kinerja yang harus dicapai sepanjang tahun anggaran 2022 yang meliputi 11 Sasaran Strategis (SS) yang diimplementasikan menjadi 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 4 Penetapan Kinerja Tahun 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%

2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,46
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan	100%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%
		6b-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80
		10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		11b-N	Persentase Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100 %

Terdapat perbedaan penetapan IKU Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya antara lain:

1. Adanya perubahan sasaran Strategis dari tahun sebelumnya 10 (sepuluh) menjadi 11 (sebelas) Sasaran Strategis hal ini sejalan dengan renstra tahun 2020 – 2024.
2. Perubahan jumlah Indikator Kinerja Utama dari tahun sebelumnya 20 (dua puluh) IKU menjadi 19 (Sembilan belas) IKU dengan adanya pengurangan IKU di tahun 2022 yaitu Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBBM.
3. Target untuk IKU yang sama dengan IKU tahun sebelumnya sebagian besar naik sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi KPKNL Padang untuk dapat mencapai target yang ditetapkan,

Di bulan Desember Tahun 2022 terjadi perubahan Pimpinan Pemilik Peta Strategi sehingga disusun IKU Komplemen dengan waktu 1 bulan menyesuaikan dengan surat Pernyataan

Menduduki Jabatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 467 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2022, KPKNL Padang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KINERJA

Pengelolaan Kinerja merupakan serangkaian proses dari penyusunan rencana kerja sampai dengan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan visi dan misi organisasi dapat tercapai. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Kemenkeu-Three dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Selain evaluasi capaian kinerja, KPKNL Padang juga melakukan reuiu kontrak kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki budaya kinerja organisasi, meningkatkan awaranness unit KPKNL Padang dalam rangka tertib administrasi dokumen pengelolaan kinerja organisasi, dan mendapatkan *feedback* untuk perbaikan pengelolaan kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan dapat diinterpretasikan tentang keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam, berikut kami sajikan Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan KPKNL Padang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian atas penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5 Capaian Kinerja

Unit Organisasi Eselon III : KPKNL Padang
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian	1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	152,97 %	120%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	36%	55,56%	120%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	144,08 %	120%
		2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	167,74 %	120%
3.	Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL	4,46	4,86	108,97%
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	4a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	65%	74,58%	114,74%
		4b-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan	100%	71,55%	71,55%
		4c-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	117,86 %	117,86%
		4d-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	124,56 %	120%

5.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	5a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	19%	1,61%	120%
6.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	6a-N	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	100%	108,70%
		6b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0%	120%
7.	Edukasi yang Efektif	7a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	92	96,65	105,05%
8.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	8a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	85%	96,26%	113,24%
9.	SDM yang Kompeten	9a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%
10.	Organisasi yang Fit For Purpose	10a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	80	92,52	115,65%
		10b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	97,98	108,87%
11.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	91,21%	95,51%
		11b-N	Persentase Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100 %	172%	120%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 2.366.295.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 : Rp 2.278.290.821,00

Pada tahun 2022, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Padang sebesar 114,79% atau mengalami kenaikan dari Nilai NKO tahun sebelumnya yang hanya mencapai 110,24%. Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama di tahun 2022 terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang capaiannya masih kuning, yaitu IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang capaiannya merah, yaitu IKU Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan. Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU Kemenkeu-Three Tahun 2022 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu Three Tahun 2022 sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian

Dengan Indikator Kinerja Utama :

1a-CP “Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang”

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1). PNBP BMN

Nilai Penerimaan Negara Yang Bersumber Dari BMN adalah PNBP yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a) penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara)
- b) pemanfaatan barang milik negara; dan
- c) pemindahtanganan barang milik negara. yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada satuan kerja atau Kementerian/Lembaga bersangkutan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Ditjen Perbendaharaan Negara.

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) sumber pengakuan adalah yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan terkait dengan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara.

2). PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3). PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a) bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pegadaian
- b) bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c) biaya permohonan lelang,

- d) uang jaminan pembeli wanprestasi,
- e) penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang

Mata Anggaran Penerimaan (MAP) yang digunakan sebagai sumber data atas penerimaan pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah berdasarkan Kepdirjen Perbendaharaan terkait Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar

Adapun capaian target realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang untuk KPKNL Padang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.177.933.554,00 dari target yang ditetapkan yaitu Rp7.307.193.189,00, dengan kata lain capaian persentase realisasi penerimaan negara KPKNL Padang dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu sebesar 152,97%. Berikut ini adalah Perbandingan antara target dan realisasi PNBPN dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Padang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 6 Perbandingan Target dan Realisasi PNBPN Tahun 2022

No	Keterangan	Target	Realisasi	%
1.	PNBP Pengelolaan BMN	4.500.000.000	8.130.348.373	180,67%
2.	PNBP Piutang Negara	7.193.189	11.950.586	166,14%
3.	PNBP Lelang	2.800.000.000	3.035.634.595	108,42%
Total		7.307.193.189	11.177.933.554	152,97%

Capaian KPKNL Padang yang maksimal tak lepas dari sinergi antara pejabat dan pegawai KPKNL Padang dan *stakeholder* yang berada di wilayah kerja KPKNL Padang. Namun demikian, KPKNL Padang juga mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam pencapaian target kinerja, diantaranya:

- a. Masih banyaknya pandangan masyarakat yang menganggap objek lelang yang dilelang merupakan asset bermasalah, sehingga enggan membeli asset melalui lelang.
- b. Banyaknya lelang yang batal akibat tidak terbitnya SKT/SKPT pada Kantor Pertanahan.
- c. Tidak lancarnya pengurusan balik nama objek lelang pada Kantor Pertanahan untuk objek berupa tanah dan/atau bangunan sehingga masyarakat akan lebih mempertimbangkan untuk membeli asset dengan cara lelang.
- d. Banyaknya lelang Tidak Ada Peminat (TAP)
- e. Debitur tidak diketahui keberadaannya
- f. Himbauan sudah dilakukan namun masih sedikit satker yang mengajukan permohonan persetujuan terkait pengelolaan BMN

- g. Terdapat sewa yang belum ditindaklanjuti dikarenakan penyewa merasa nilai sewa terlalu tinggi

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan pemanfaatan dan penghapusan BMN satker;
- b. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan komunikasi ke stakeholder lelang terkait peraturan pelaksanaan lelang;
- c. Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholder yang ada di wilayah kerja KPKNI Padang;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemohon Lelang agar mengajukan lelang dengan objek yang marketable (potensi laku) dan free and clear;
- e. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang agar meningkatkan usaha pemasaran objek lelang melalui media sosial pemohon maupun lainnya, dan tidak hanya mengandalkan pengumuman sebagaimana yang telah ditetapkan pada Penetapan Jadwal Lelang;
- f. Menyampaikan pemberitahuan Crash Program Penyelesaian Utang kepada debitur Rumah Sakit M. Jamil Padang;
- g. Melakukan pemanfaatan BMN satuan kerja di lingkungan KPKNL Padang;
- h. Berkoordinasi dengan satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama pemanfaatan BMN dan penghapusan BMN kondisi rusak berat.

Rencana aksi dari yang akan dilakukan oleh KPKNL Padang adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
- b. Melakukan pendampingan kepada Pengguna Barang maupun Mitra atas kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan data/dokumen persyaratan untuk usulan ke Pengelola Barang;
- c. Penggalan Potensi PNBPN pada satker-satker potensial;
- d. Melakukan monitoring dan optimalisasi terhadap aset-aset dalam penguasaan Pengelola Barang agar dapat menghasilkan PNBPN;
- e. Permohonan lelang ulang aset PT Texmaco Group;
- f. Melakukan edukasi kepada Pemohon Lelang perihal jenis lelang selain yang telah pernah diajukan ke KPKNL beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan balik nama agar proses balik nama Pembeli Lelang tidak terdapat kendala;

- h. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lelang DJKN/KPKNL agar lebih mengetahui tentang kelebihan-kelebihan pembelian melalui lelang DJKN/KPKNL;
- i. Sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja;
- j. Melakukan penggalan potensi PNBP pada satuan kerja;
- k. Berkoordinasi dengan satuan kerja dan sinergi tim penilai dengan seksi PKN terkait BMN yang akan diajukan pemanfaatannya.

1b-CP “Persentase Produktivitas Lelang”

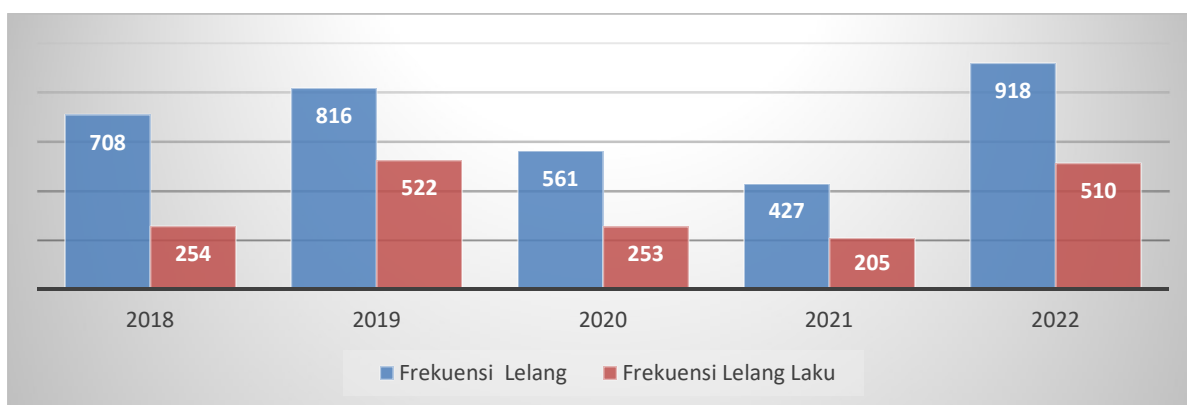
Produktivitas lelang dinilai dari seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku. Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan , dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang

Realisasi jumlah frekuensi lelang pada tahun 2022 sebanyak 918 frekuensi dengan lelang yang laku sebanyak 510 frekuensi. Realisasi presentase produktivitas lelang mencapai 55,56% dari target yang ditetapkan sebesar 36%. Sejak tahun 2022 jumlah frekuensi lelang tidak lagi dihitung berdasarkan jumlah risalah lelang melainkan dihitung berdasarkan jumlah lot barang yang dilelang. Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah frekuensi lelang keseluruhan dengan frekuensi lelang yang laku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

Tabel 7 Perbandingan Rekuensi Lelang dengan Frekuensi Lelang Laku

Frekuensi	2018	2019	2020	2021	2022
Lelang	708	816	561	427	918
Lelang laku	254	522	253	205	510

Grafik 4



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain a). melakukan penggalan potensi lelang ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda b). melakukan penggalan potensi lelang ke perbankan diutamakan untuk yang laku dan c). mengirim surat penggalan potensi lelang ke UMKM di wilayah kerja KPKNL Padang.

Kendala yang dihadapi antara lain kurang familiernya masyarakat dengan proses jual beli melalui lelang.

Rencana aksi yang akan dilakukan dimasa depan antara lain:

- Melakukan koordinasi terkait permohonan SKPT Online,
- Melakukan penggalan potensi lelang Non Eksekusi Wajib BMN,
- Melakukan penggalan potensi lelang UMKM,
- Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Sumbar terkait rencana pelaksanaan lelang sitaan pajak secara serentak

Sasaran Strategis 2: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Dengan Indikator Kinerja Utama:

2a.CP “Persentase Realisasi Pokok Lelang”

Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

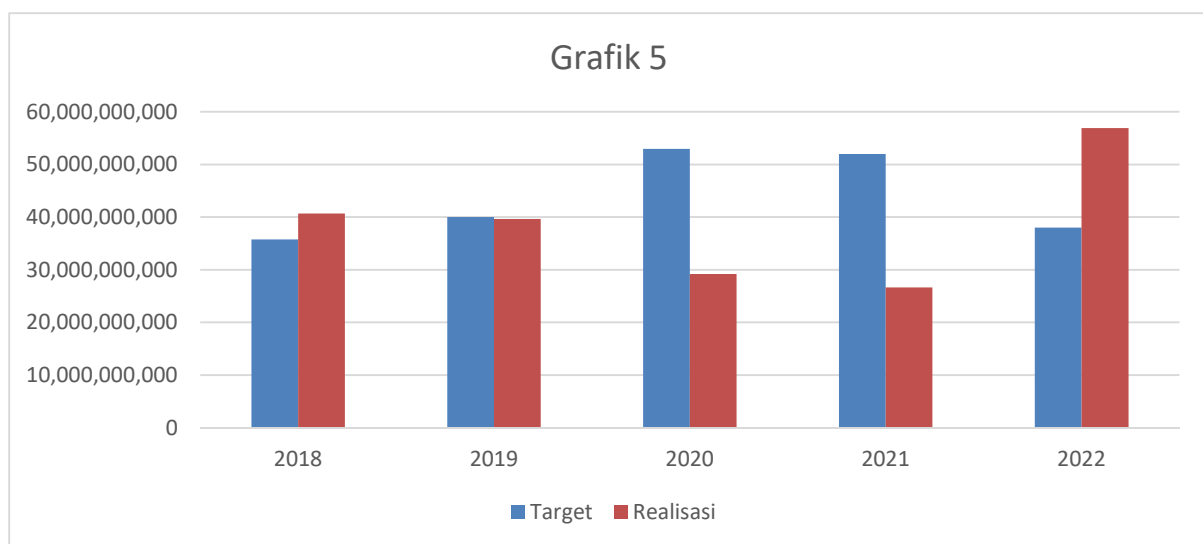
Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu. Target jumlah pokok lelang pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 72 Milyar.

Realisasi pokok lelang dari Pejabat Lelang Kelas I (PL I) dan Pegadaian s.d. triwulan IV 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pokok lelang PL Kelas I mencapai Rp56.933.116.112,00 dari target sebesar Rp38.000.000.000,00.
2. Pokok lelang pegadaian mencapai Rp46.806.877.300,00 dari target Rp34.000.000.000,00. Pokok lelang secara keseluruhan mencapai Rp103.739.993.412,00 dari target sebesar Rp72.000.000.000,00. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi pokok lelang PL Kelas I pada KPKNL Padang dalam lima tahun terakhir:

Tabel 8 Perbandingan Target dan Realisasi Pokok Lelang

Pokok Lelang	2018	2019	2020	2021	2022
Target	35.752.000.000	40.000.000.000	53.000.000.000	52.000.000.000	38.000.000.000
Realisasi	40.675.581.100	39.666.016.596	29.194.836.581	26.640.097.586	56.933.116.112



Adapun trajectory tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Perbandingan Target dan Realisasi Pokok Lelang Tahun 2022

KPKNL Padang	SS: 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	IKU: Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Min/ TLK
Realisasi	31,27%	160,01%	160,01%	99,13%	99,13%	144,08%	144,08%	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penggalan potensi lelang kepada calon stakeholder yang ada di wilayah kerja KPKNI Padang
2. Melakukan koordinasi dengan Pemohon Lelang agar mengajukan lelang dengan objek yang marketable (potensi laku)
3. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang agar meningkatkan usaha pemasaran objek lelang melalui media sosial Pemohon maupun lainnya, dan tidak hanya dengan pengumuman sebagaimana yang telah ditetapkan pada Penetapan Jadwal Lelang
4. Adanya implementasi pelaksanaan Permohonan lelang online dan penawaran melalui lelang.go.id dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang yang efisien, kompetitif dan adil.

Kendala/akar masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya pandangan masyarakat yang menganggap objek lelang yang dilelang merupakan asset bermasalah, sehingga enggan membeli asset melalui lelang
2. Banyaknya lelang yang batal akibat tidak terbitnya SKT/SKPT pada Kantor Pertanahan
3. Tidak lancarnya pengurusan balik nama objek lelang pada Kantor Pertanahan untuk objek berupa tanah dan/atau bangunan sehingga masyarakat akan lebih mempertimbangkan untuk membeli asset dengan cara lelang

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan diperiode berikutnya antara lain :

1. Melakukan penggalan potensi lelang UMKM.
2. Berkoordinasi dengan pemohon lelang baik dari pihak perbankan maupun Instansi Pemerintah dan PT.Pegadaian untuk menggali potensi lelang.
3. Melakukan koordinasi terkait permohonan SKPT Online
4. Melakukan penggalan potensi lelang Non Eksekusi Wajib BMN

5. Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Sumbar terkait rencana pelaksanaan lelang sitaan pajak secara serentak
6. Melakukan edukasi kepada Pemohon Lelang perihal jenis lelang selain yang telah pernah diajukan ke KPKNL beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan
7. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan balik nama agar proses balik nama Pembeli Lelang tidak terdapat kendala
8. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lelang DJKN/KPKNL agar lebih mengetahui tentang kelebihan-kelebihan pembelian melalui lelang DJKN/KPKNL

2b-CP “Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara”

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKP lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKP yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

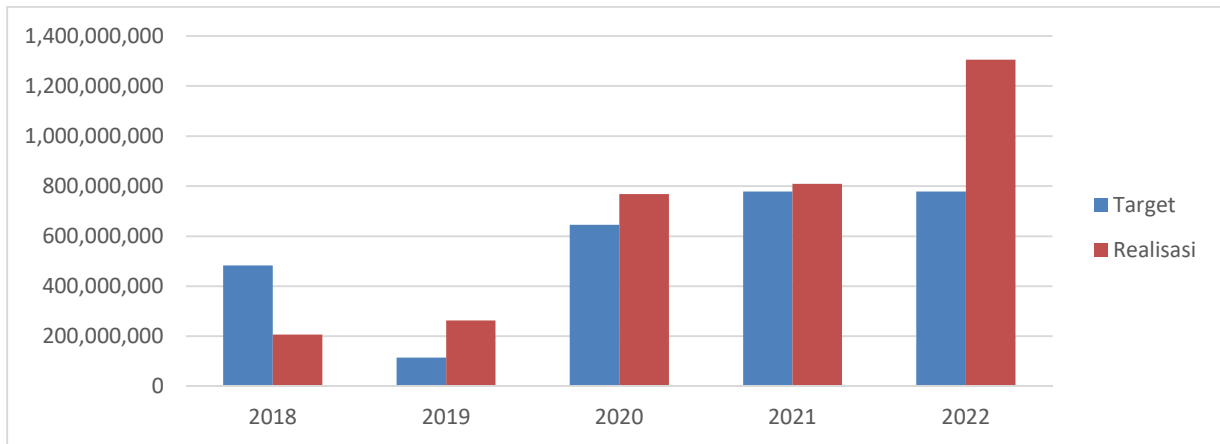
1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat)
5. Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan
6. Koreksi Data (perbaikan pencatatan/nilai) Adapun target IKU ini sebesar 100% (Rp2.500.000.000.000)

Pada tahun 2022 KPKNL Padang mendapat target sebesar Rp777.933.929,00 dan realisasi yang diperoleh sebesar Rp1.304.915.503,00 Capaian realisasi tersebut dapat memenuhi target karena kemampuan dan itikad debitur untuk menyelesaikan hutangnya serta upaya proaktif dari pegawai KPKNL Padang. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Perbandingan Target dan Realisasi PNDS 2018 s.d. 2022

PNDS	2018	2019	2020	2021	2022
Target	482.500.000	115.344.249	645.757.869	777.933.929	777.933.929
Realisasi	206.746.498	263.709.103	767.579.741	808.567.922	1.304.915.503

Grafik 6



Perbandingan Realisasi Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PND) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan semua BKPN BUMN/D Perbankan telah dikembalikan ke masing-masing penyerah piutang sesuai PMK 168/PMK.06/2013. Pada tahun 2022.

Hal yang telah dilakukan untuk mendukung capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi crash program keringanan hutang secara massif baik dengan surat maupun kunjungan langsung.
2. Penagihan langsung ke lapangan.
3. Profiling BKPN yang potensial

Kendala/akar masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pandemi Covid-19 yang belum benar-benar mereda di awal tahun 2022 mengakibatkan susahnya perekonomian masyarakat sehingga debitur yang berhutang tidak mampu untuk mengangsur apalagi melunasi hutang.
2. Adanya Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dimana Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER/16/012015/Nomor PRJ-01/KN/2015 tanggal 29 Januari 2015 sudah berakhir dan tidak ada perpanjangan. Imbasnya KPKNL/PUPN Cabang tidak dapat menerima penyerahan pengurusan piutang dari BPJS dan KPKNL/PUPN Cabang mengembalikan BKPN kepada BPJS selaku Penyerah Piutang. Hal ini menyebabkan berkurangnya PND pada KPKNL Padang.
3. Debitur tidak diketahui keberadaannya.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di periode berikutnya antara lain :

1. Peningkatan tahap pengurusan BKPN
2. Sosialisasi crash program kerunganan hutang
3. Meningkatkan tahap pengurusan minimal sampai dengan tahap penyampaian Surat Paksa
4. Memprioritaskan pengurusan piutang besar di atas 50 juta
5. Memperluas sosialisasi crash program dengan sarana medsos yang ada. Bekerja sama dengan penyerah piutang dalam melakukan penagihan

Sasaran Strategis 3: Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi

Dengan Indikator Kinerja Utama:

3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kanwil dan KPKNL

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada penilaian atas penyelesaian layanan unggulan (quick win). Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

$0 \leq x \leq 1$ = tidak puas

$1 < x \leq 2$ = kurang puas

$2 < x \leq 3$ = cukup puas

$3 < x \leq 4$ = puas

$4 < x \leq 5$ = sangat puas

Realisasi indeks kepuasan pengguna layanan pada KPKNL Padang tahun 2022 sebesar 4,86 (skala 5) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2022

Layanan	Total Indeks
Pengelolaan Kekayaan Negara	4,87
Piutang Negara	4,86
Pelayanan Penilaian	4,86
Pelayanan Lelang	4,85
Indeks Kepuasan	4,86

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja:

1. KPKNL Padang membuat salah satu inovasi dalam pelayanan yaitu pemangsaan jangka waktu pelayanan/SOP sehingga pelayanan bisa selesai lebih cepat;
2. Selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan dan meminta feedback dari pelayanan yang telah diberikan untuk perbaikan pelayanan.

Sasaran Strategis 4: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Dengan Indikator Kinerja Utama:

4a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar.

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020.

Tujuan dari SBSK ini adalah untuk memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai dengan potensi terbaiknya (*highest and best use principle*). Sasaran strategis dari SBSK ini adalah terwujudnya pengelolaan kekayaan negara yang optimal melalui penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara atas Pengelolaan Aset Negara. Adapun target pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK adalah :

- i) Tanah Bangunan Gedung Kantor (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- ii) Tanah Bangunan Rumah Negara (termasuk data luas total dan luas dasar bangunan semua bangunan yang berdiri di atasnya)
- iii) Bangunan Gedung Kantor
- iv) Bangunan Rumah Negara

Adapun target yang diberikan adalah 65% dan di tahun 2022 telah tercapai realisasi sebesar 74,58% dari target tersebut.

Hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan pendampingan/asistensi ke satker terkait pengisian form SBSK
- b. Melakukan koordinasi dan melaporkan hasil perhitungan SBSK ke Kanwil DJKN RSK;
- c. Melakukan koordinasi dengan satker di wilayah kerja KPKNL Padang;

Rencana aksi yang akan dilakukan antara lain melakukan koordinasi dengan satker di Kementerian Lembaga terkait pengisian form SBSK.

4b-CP “Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan”

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2022 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dan penuntasan bidang tanah Bersertipikat Belum Sesuai Ketentuan (dengan mekanisme penggantian nama).

Tujuan dari IKU ini adalah mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Hukum, dan Fisik) dalam pengelolaan kekayaan negara terutama dari aspek penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan pengendalian.

Adapun capaian IKU Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{bidang tanah disertipikatkan} + \sum \text{penuntasan bidang tanah BBSK}}{\sum \text{target (bidang tanah disertipikatkan} + \text{penuntasan BBSK)}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 KPKNL Padang mendapat target sebanyak 970 sertipikat. Sampai dengan akhir Desember 2022 realisasi bidang tanah yang disertipikatkan sebanyak 694 bidang tanah atau 71,55%. Beberapa kendala yang menyebabkan target tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksiapan anggaran pematokan batas tanah pada Satuan Kerja PUPR, dimana revisi anggaran baru selesai Bulan Oktober 2022.
2. Beberapa persyaratan usulan sertifikasi BMN yang belum dapat dipenuhi (seperti adanya Lurah yang tidak mau tanda-tangan,
3. adanya kewajiban penandatanganan oleh pemilik tanah yang bersepadan, dsb) menjadi kendala di beberapa satuan kerja.

Upaya-upaya yang telah dilakukan KPKNL Padang dalam pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang mempunyai target sertifikasi BMN berupa tanah
3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan
4. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait dalam rangka monitoring progress pensertipikatan tanah BMN yang diusulkan Satuan Kerja K/L.
5. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja K/L guna percepatan pengusulan sertifikasi tanah BMN ke Kantor Pertanahan
6. Koordinasi dengan Kanwil dan kantor pusat terkait penyelesaian kendala

Rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL ke depan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan satker yang menjadi target sertifikasi
2. Melakukan percepatan koordinasi awal tahun dalam rangka persiapan Sertifikasi Tanah BMN Tahun 2023, baik ke Kantor Pertanahan maupun Satuan Kerja K/L yang memiliki jumlah target yang signifikan.
3. Mengundang Rapat/Sosialisasi Satuan Kerja K/L dan Kantor Pertanahan dalam rangka monitoring percepatan usulan Sertifikasi Tanah BMN Tahun 2023
4. Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil Pertanahan beserta satker terkait.
5. Menginventarisir kembali bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat.

4c-CP “Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)”

IKU Persentase Efektifitas Penyelesaian BKPN menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan: 1. BKPN Lunas 2. BKPN Penarikan 3. BKPN dikembalikan, dan 4. BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

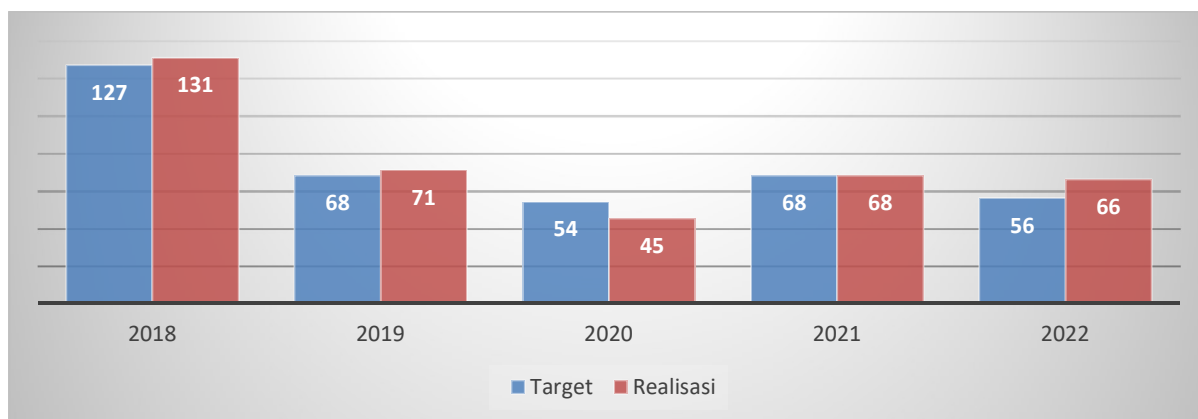
Penatausahaan Berkas Kasus Piutang negara (BKPN) memiliki peran yang sangat penting dalam pengurusan piutang negara dimana saat ini menjadi salah satu tugas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jumlah BKPN yang dapat diselesaikan (lunas, ditarik, PSBDT, dikembalikan) pada tahun 2022 tercapai sebesar 66 berkas atau 117,87% dari target yang ditetapkan sebanyak 56 BKPN.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam lima tahun terakhir untuk KPKNL Padang adalah sebagai berikut :

Tabel 12

BKPN	2018	2019	2020	2021	2022
Target	127	68	54	68	56
Realisasi	131	71	45	68	66

Grafik 7



Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain:

1. Peningkatan tahap pengurusan BKPN
2. Sosialisasi crash program keruganan hutang
- Penerbitan PSBDT utk BKPN yg telah optimal pengurusannya

Kendala yang dihadapi:

1. Sebagian Debitur tidak mampu menyelesaikan hutang
2. Keberadaan Penanggung Hutang tidak jelas
3. Tidak di dukung dengan barang jaminan

Rencana Aksi:

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi BKPN untuk optimalisasi penyelesaian piutang negara di tahun 2023
2. Menyelesaikan stock opname BKPN di seksi Piutang Negara
3. Menginventarisasikan BKPN yang pengurusannya belum optimal
4. Membentuk Tim penyelesaian Piutang Negara dengan Penyerah Piutang
5. Melakukan pengurusan secara optimal terhadap BKPN yang belum terselesaikan di tahun 2022.

4d-CP “Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)”

Mulai Tahun 2020, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang melakukan upaya peningkatan mutu pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui evaluasi kinerja Portofolio Aset. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan salah satu misi DJKN yaitu mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan Negara.

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 triliun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset). Tujuan dari IKU ini adalah terwujudnya struktur portofolio aset negara yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Pada tahun 2022 KPKNL Padang mendapat target sebanyak 230 dengan realisasi sampai akhir tahun 2022 sebanyak 269 atau telah melampaui target sebesar 116,96%.

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja antara lain:

1. Melaksanakan survei portofolio aset
2. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap satker yang menjadi target evaluasi kinerja BMN;
3. Meminta data yang dibutuhkan dalam perhitungan portofolio aset kepada BPS
4. Melakukan pendampingan kepada satker dalam pengisian formulir pendataan
5. Melakukan survei lapangan dalam rangka evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)
6. Penyusunan Laporan kegiatan ke Kanwil dan kantor pusat

Sasaran Strategis 5: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional Dengan Indikator Kinerja Utama:

5a-CP “Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian”

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN). Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. apabila nilai hasil penyesuaian lebih rendah dari nilai pada persetujuan namun masih di bawah nilai wajar hasil penilaian tim penilai, maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%. Mempertimbangkan profesionalisme dan integritas penilai, terdapat pengecualian perhitungan untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa. Dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan), Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%. Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama. Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Formula perhitungan IKU ini adalah

$$Deviasi = \left[\frac{A - B}{B} \right] \times 100\%$$

A = Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan perhitungan

B = Nilai yang disampaikan dalam laporan untuk persetujuan

[] = Nilai Mutlak

Sumber data IKU ini adalah Surat Persetujuan/Penolakan Pengelolaan dari Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan form rekapitulasi ketergunaan hasil penilaian yang dibuat Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Target dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

KPKNL Padang	SS: 1. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang efektif							
	IKU: Deviasi ketergunaan hasil penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	PoI/KP
Target	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%	Min/ TLK
Realisasi	0%	0%	0%	10,43%	10,43%	1,61%	1,61%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

IKU ini merupakan IKU *Cascading Peta* yang baru pada tahun 2020, dan merupakan IKU Kemenkeu *One*, serta mandatory kepada unit vertikal di DJKN. Pada tahun 2022 target deviasi diperketat menjadi 19%. Realisasi indeks deviasi pada KPKNL Padang tahun 2022 sebesar 1,61% atau tercapai 120%

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Adanya poin pada manual IKU yang menyebutkan bahwa untuk nilai persetujuan yang menggunakan nilai dari pengguna/calon penyewa, dapat dihitung deviasi apabila terdapat bukti bahwa persetujuan yang ditetapkan oleh pengelola barang dapat/tidak dapat ditindaklanjuti (pemanfaatan/penjualan). Dalam hal dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 50%, dan dalam hal tidak dapat ditindaklanjuti maka deviasinya adalah 0%. Hal ini mengakibatkan, persetujuan yang menggunakan usulan nilai dari calon penyewa/pengguna yang lebih tinggi daripada hasil penilaian dan ditindaklanjuti, maka deviasi otomatis menjadi 50%.
2. Untuk penilaian dalam rangka pemanfaatan, terdapat usulan nilai sewa yang disampaikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran besaran yang disampaikan.
3. Hasil laporan penilaian tidak digunakan sebagai acuan dalam surat persetujuan

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Padang tahun 2022 antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pemohon dalam hal ini seksi PKN terkait usulan nilai limit maupun nilai sewa objek yang akan dimohonkan penilaian.
2. Melakukan pemaparan konsep laporan penilaian untuk mendapatkan masukan dari penelaah terkait nilai yang dihasilkan.
3. Melakukan review / kaji ulang terhadap laporan penilaian BMN

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun mendatang yaitu:

1. Pelaksanaan penilaian secara akuntabel dengan didukung pengendalian kualitas hasil penilaian dan melakukan koordinasi antara tim Penilai dengan Pengelola BMN dengan menyampaikan penjelasan / ekspose atas penilaian yang telah dihasilkan.
2. Perlu dilakukan pengecekan kembali oleh pengelola barang dalam hal ini Seksi PKN ataupun pengecekan bersama terhadap permohonan penilaian dalam rangka pemanfaatan dimana pengguna/calon penyewa menyampaikan besaran usulan sewa yang kurang tepat.
3. Melakukan edukasi ke satker pemohon terkait nilai permohonan BMN yang akandipindahtangankan / dimanfaatkan
4. Melakukan peer review untuk memastikan nilai yang dihasilkan
5. Melakukan sinergi dengan Seksi PKN terkait permohonan pengelolaan BMN

**Sasaran Strategis 6: “Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif”
Dengan Indikator Kinerja Utama:**

6a-N “Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction”

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjaring peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi:

1. Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang.
2. E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Capaian IKU ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}}{\sum \text{Frekuensi Lelang}} + \frac{\sum \text{Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}}{\sum \text{Realisasi Frekuensi lelang}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2022 realisasi Indikator Kinerja Utama ini tercapai sebesar 100%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 14

<i>e-Auction</i>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Target	25%	60,00%	85%	90%	90%	92%	92%
Realisasi	52,60%	62,73%	100%	100%	100%	100%	100%

Hal-hal yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini:

1. Penggalan potensi lelang ke Kepolisian, Kejaksaan dan Pemda di Wilayah Kerja KPKNL Padang;
2. Penggalan potensi lelang ke Perbankan diutamakan untuk yang laku;
3. Melakukan sosialisasi ke stake holder lelang;
4. Melakukan koordinasi ke stake holder lelang baik melalui whatsapp maupun pada saat di APT utk melaksanakan lelang secara online.

Kendala yang dihadapi antara lain adalah bahwa masih adanya pemohon lelang yang belum paham terkait lelang melalui internet./online.

6b-CP “Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN”

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bidad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian). Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari: 1) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi 2) Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir.

Pada tahun 2022 target deviasi Data PNBP Fungsional DJKN adalah 10%. Realisasi Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada KPKNL padang tahun 2022 sebesar 0% atau tercapai 120%.

Hal-hal yang sudah dilakukan:

1. Koordinasi antara Seksi Lelang dan Seksi PN serta Seksi HI dengan Subbagian Umum terkait data PNBPN Biad dan Bea Lelang
2. Melaksanakan rekonsiliasi data PNBPN Biad PN dari data Focus PN dan data PNBPN Bea Lelang dari Dropbox; Dengan data OMSPAN
3. Melakukan edukasi dan komunikasi ke stake holder terkait tuisi KPKNL secara semesteran

Sasaran Strategis 7: Edukasi Yang Efektif

Dengan Indikator Kinerja Utama:

7a-N “Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi”

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Berdasarkan Kontrak Kinerja KPKNL Padang dengan Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, target IKU “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” tahun 2022 ditetapkan sebesar 92. Dari hasil evaluasi kinerja, target tersebut telah terealisasi sebesar 96,65 dari target yang ditetapkan. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam lima tahun terakhir untuk KPKNL Padang adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Edukom	2018	2019	2020	2021	2022
Target	87	87	90	92	92
Realisasi	92,35	93,495	92,50	98,50	96,65

Hal-hal yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja antara lain:

1. Melakukan edukasi dan komunikasi ke stake holder terkait tuisi KPKNL secara semesteran;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa;
3. Selalu berusaha memberikan edukasi yang baik kepada pengguna jasa;
4. Selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pengguna jasa baik secara langsung maupun tidak langsung;

Sasaran Strategis 8: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
Dengan Indikator Kinerja Utama:

8a-CP “Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara”

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN merupakan bagian dari pengawasan dan pengendalian BMN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN yang bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pengawasan dan pengendalian BMN yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal.

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang. Target tidak lanjut pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN pada KPKNL Padang Tahun 2022 sebesar 85%.

Realisasi KPKNL Padang Tahun 2022 sebesar 96,26% atau dengan nilai indeks tanpa batas 113,24%. Ini diperoleh dari 77 persetujuan yang dapat ditindaklanjuti dari 80 persetujuan yang telah dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Seksi PKN.

Tabel 16 Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan kekayaan Negara Th 2022

Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	2022
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L	39
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2022 yang ditindaklanjuti oleh K/L	38
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2021	39
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2022	41

Adapun kendala yang dihadapi oleh KPKNL Padang dalam pencapaian tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan BMN dengan mekanisme sewa pada LPP RRI Padang dengan nomor surat persetujuan S-10/MK.6/KNL.0301/2022 dan nilai sewa Rp2.766.250,00 tidak ditindaklanjuti oleh satker dengan alasan penyewa tidak sanggup membayar.
- b. Pemanfaatan BMN dengan mekanisme sewa pada LPP RRI Padang dengan nomor surat persetujuan S-28/MK.6/KNL.0301/2022 dan nilai sewa Rp4.146.667,00 tidak ditindaklanjuti oleh satker dengan alasan penyewa tidak sanggup membayar.
- c. Hasil Penilaian yang dianggap terlalu tinggi untuk pemanfaatan BMN oleh mitra menyebabkan persetujuan tidak ditindaklanjuti

Hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja antara lain:

- a. Melakukan monev ke satker
- b. Koordinasi dengan Kanwil/APIP dari satker
- c. Selalu mengingatkan kepada satker yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan BMN, baik pemindahtanganan maupun pemanfaatan untuk segera menindaklanjuti persetujuan tersebut sebelum jangka waktu persetujuan lewat waktu;
- d. Membuat database rekapitulasi persetujuan pengelolaan BMN dan tindak lanjut yang telah satker lakukan antara lain berupa permohonan lelang untuk penjualan BMN, bukti setor PNBSP sewa aset untuk pemanfaatan BMN.

Rencana aksi dari pencapaian presentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara pada KPKNL Padang adalah sebagai berikut:

- a. Monitoring Tindak Lanjut dan Wasdal Persetujuan yang telah terbit dengan cara yang lebih intens. Rencana awal akan dilakukan wasdal persetujuan langsung setelah persetujuan diterbitkan, sehingga jika terjadi kendala atas persetujuan yang diterbitkan dapat segera dilakukan tindak lanjut dari mitigasi resiko yang telah direncanakan.
- b. Menyampaikan peringatan kepada Satker terhadap persetujuan yang menjelang berakhir masa berlakunya secara hukum dan belum ditindaklanjuti agar segera menuntaskan tindak lanjut dari persetujuan.
- c. Melakukan evaluasi dengan membahas bersama dengan satker/mitra terkait kendala-kendala yang dihadapi untuk menyelesaikan tindak lanjut dari persetujuan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan koordinasi dengan satker terkait monev persetujuan/ keputusan pengelolaan BMN yang sudah diterbitkan

Sasaran Strategis 9: SDM yang Kompeten

Dengan Indikator Kinerja Utama:

9a-N “Persentase pengembangan kompetensi pegawai”

IKU ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangan-nya.

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Tujuan IKU ini adalah mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan pengembangan pegawai. IKU ini bermanfaat untuk mencermati pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Persentase pengembangan kompetensi pegawai menggambarkan kesesuaian kompetensi pegawai dengan bidang pekerjaannya. Lingkup peningkatan kompetensi pegawai salah satunya adalah melalui pelatihan yang diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, *internship/on the job training, basic training (DTSD), workshop*, bimbingan teknis dan *sharing session*. Bimbingan teknis dan *sharing session* harus melibatkan narasumber eksternal satker penyelenggara.

Pada tahun 2022 dengan target 100% capaiannya 100% (100% dari target). Perbandingan capaian atas persentase pengembangan kompetensi pegawai pada KPKNL Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17 Capaian Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Hard Competency	2018	2019	2020	2021	2022
Target	91	87	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100

Hal-hal yang sudah dilakukan adalah :

1. Mengajukan dan melaksanakan diklat/e-learning/PJJ/ untuk setiap pegawai dan monitoring pelaksanaan diklat masing-masing pegawai.
2. Mengajukan pegawai yang belum mengikuti diklat, agar mengikuti pelatihan/diklat, melalui aplikasi diklat dan e-learning
3. Mendorong pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan minat dan tupoksi, utamanya yang bersifat Open Access

Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya perhatian dan kesadaran pegawai untuk mengerjakan diklat/e-learning/ PJJ yang diusulkan.

Rencana aksi dimasa mendatang antara lain:

1. Pelaksanaan mutasi internal dengan harapan penyegaran kinerja masing-masing pegawai,
2. Memonitoring pelaksanaan diklat/ e-learning/PJJ pegawai,
3. Dibuatkan kegiatan untuk peningkatan kompetensi maupun sinergi melalui capacity building, kegiatan keagamaan dan olahraga.
4. Melakukan pemantauan terkait pemenuhan IKU hard competency

Sasaran Strategis 10: Organisasi yang Fit For Purpose

Dengan Indikator Kinerja Utama:

10a-N “Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja”

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja

Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja tugas KPKNL telah dilaksanakan dengan realisasi pada tahun 2022 adalah 92,52 dari target sebesar 80 dengan peningkatan sebesar 115,65%. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam lima tahun terakhir untuk KPKNL Padang sebagai berikut:

Tabel 18

Survei	2018	2019	2020	2021	2022
Target	70	75	75	75	80
Realisasi	90,41	92,40	85	96,25	92,52

Hal-hal yang telah dilakukan untuk pencapaian target antara lain
Melakukan pelaksanaan pengelolaan kinerja serta melaporkan hasilnya secara tepat waktu

Rencana aksi :

Melaksanakan kegiatan pengelolaan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan dan melakukan pemantauan serta evaluasi progress kegiatannya.

10b-N “Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator”

Tingkat efektivitas *Forum Group Discussion* (FGD) merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan. Kegiatan FGD ini menjadi suatu kegiatan rutin yang diadakan secara triwulanan oleh KPKNL Padang. Keefektivitasan penyelenggaraan FGD tersebut mendapatkan indeks 97,98 dari target 90.

Kendala yang dihadapi antara lain kurang disiplinnya para pegawai dalam mengikuti pelaksanaan FGD dan membaerikan penilaian /feed back.

Hal-hal yang telah dilakukan:

1. Mengikuti preliminary FGD Pejabat Administrator
2. Melaksanakan FGD Pejabat Administrator dan melaporkan pelaksanaannya melalui eperformance

Rencana aksi ke depan yaitu melaksanakan FGD Pejabat Administrator sesuai jadwal.

Sasaran Strategis 11: Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal Dengan Indikator Kinerja Utama:

11a-CP “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran”

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan

anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

IKU ini diukur dari aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif dalam mengelola DIPA. Capaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Padang s.d Realisasi Q4 Tahun 2022 = 91,21% atau dengan nilai indeks tanpa batas 95,51. Capaian tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 95,5%.

Tabel 19 Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Th 2022

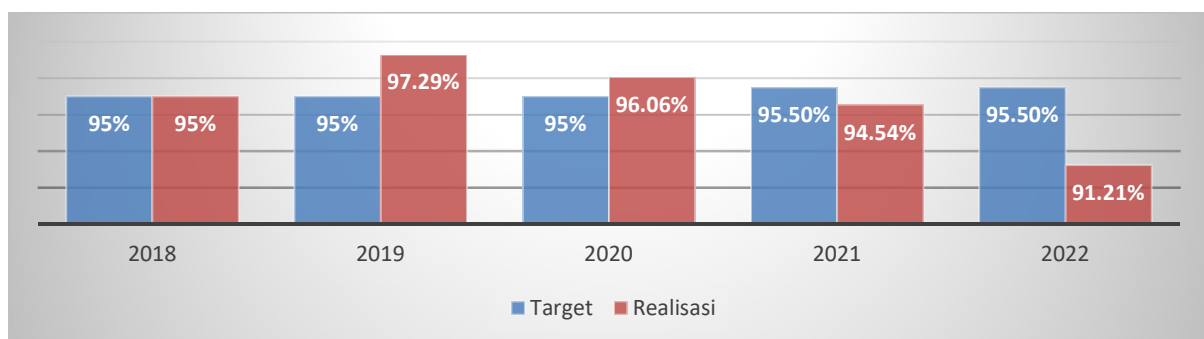
K-Wide	SS. Penguatan Pelaksanaan anggaran yang berkualitas							
	11a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target		95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	Max/ AVG
Realisasi		100,00%	96,12%	91,79%	91,79%	91,21%	91,21%	
Capaian		104,71	100,64	96,12	96,12	95,51	95,51	

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dalam lima tahun terakhir untuk KPKNL Padang antara lain:

Tabel 20 Capaian Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 2018 s.d 2022

Anggaran	2018	2019	2020	2021	2022
Target	95%	95%	95%	95,5%	95,5%
Realisasi	95%	97,29%	96,06%	94,54%	91,21%

Grafik 8



Adapun akar masalah ataupun kendala yang dihadapi terkait belum tercapainya target tersebut oleh KPKNL Padang antara lain adalah sebagai berikut:

1. IKU Persentase Pengelolaan Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Padang 2 (dua) tahun belakangan realisasinya berwarna kuning,
2. Pada Tahun 2023 ini kegiatan rencana pelaksanaan tugas dengan realisasi yang tidak sesuai dari masing-masing seksi / kelompok jafung agar dimasukkan sebagai risiko dengan level sedang.
3. Penyerapan Anggaran Belum Maksimal karena keterbatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19

Hal-hal yang sudah dilakukan:

1. Memaksimalkan belanja barang operasinal perkantoran untuk memaksimalkan penyerapan anggaran
2. Pemutakhiran RPD Triwulan
3. Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2023

Rencana aksi yang akan dilakukan oleh KPKNL Padang untuk memperbaiki agar capaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik kedepannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, yaitu secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik vendor maupun internal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian
- b. Terus melakukan koordinasi dengan pemilik kegiatan dan melakukan monitoring secara berkala setiap usulan perencanaan kegiatan (konsistensi RPD)
- c. Melakukan revisi anggaran secara berkala untuk mendukung rencana kerja
- d. Melakukan monitoring terkait capaian output pada KPKNL Padang sehingga dapat dipastikan tercapainya output sesuai/dapat melampaui target.
- e. Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar seksi serta memberi pemahaman bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya dibebankan kepada Subbagian Umum namun perlu kerja sama dari berbagai pihak agar risiko dapat dimitigasi.

11b-N “Persentase Pengelolaan BMN dan Pengadaan”

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola

Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

a. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

b. Persentase Validitas dan Completness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

2. Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan

Dukungan Tingkat Kualitas Pengadaan berfokus pada dukungan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan. Indeks tata kelola pengadaan (ITKP) merupakan Indeks yang diukur oleh LKPP yang terdiri dari indikator yang mengukur tata kelola pengadaan dalam tingkat operasional, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan, maupun dari segi sistem pengadaan. Dalam mendukung capaian ITKP dengan target minimal baik di tahun 2023 maka diperlukan indikator dukungan ITKP yakni Persentase Dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan. Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatitkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatitkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Pada tahun 2022 target IKU Persentase Pengelolaan BMN dan Pengadaan ditetapkan sebesar 100% dan capaian 172%.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja antara lain adalah:

1. Menyiapkan lebih awal rencana pengadaan dan pengelolaan BMN.
2. Melaporkan RKBMN tepat waktu
3. Kesesuaian pelaksanaan RP4
4. Menggunakan aplikasi SiRUP untuk rencana pelaksanaan pengadaan
5. Pelaksanaan pengadaan secara nonelektronik dan elektronik

Rencana aksi :

- a. Pembentukan Tim Sensus BMN

b. Pemeliharaan/Perawatan BMN

IKU Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan, pengadaan memerlukan banyak aplikasi dengan jenis pengadaan yang berbeda, diperlukan koordinasi dan dukungan dari pihak lain diluar subbagian umum, agar dimasukkan juga sebagai risiko dengan level sedang. Kedepan rencana aksinya adalah meningkatkan sinergi dan kerja sama antar seksi serta Memberi pemahaman bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya dibebankan kepada Subbagian Umum namun perlu kerja sama dari berbagai pihak agar risiko dapat dimitigasi.

KINERJA LAINNYA

Selain dari 19 (Sembilan belas) IKU yang ditetapkan oleh DJKN dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPKNL Padang juga telah melakukan kegiatan/partisipasi yang tak kalah pentingnya terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Lelang Asset PT. Texmaco Group di wilayah Kota Padang

Pada tahun 2022 KPKNL Padang melaksanakan lelang terhadap asset PT Texmaco Group berupa Sebidang tanah SHGB No. 8 seluas 125.360 m2 berlokasi di Jalan Lintas Padang-Solok, Kel. Bandar Buat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang.

2. Pelaksanaan Press Release Capaian Kinerja dan AICo Regional Sumatera Barat

Dalam rangka memberikan informasi peran dan kontribusi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan APBN di Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2022, Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumbar termasuk KPKNL Padang yang mewakili unsur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan Konferensi Pers Capaian APBN dan AICo Regional Sumatera Barat dengan mengundang media cetak, media elektronik, dan media online di Kota Padang. Kegiatan ini dilakukan setiap triwulan bersama dengan Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

3. Pelaksanaan Capacity Building Bersama Bank Mandiri

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan KPKNL Padang menuju kantor berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di akhir tahun 2022 KPKNL Padang menyelenggarakan kegiatan Capacity Building untuk peningkatan Service Excellent

bersama Bank Mandiri. Kegiatan tersebut menghadirkan nara sumber dari Service Quality Officer (SQO) Bank Mandiri Area Padang.

4. Bimbingan Teknis Penilaian Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2022 Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau bersinergi dengan KPKNL Padang dalam memberikan Bimbingan Teknis Penilaian kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dan dihadiri oleh perwakilan dari SKPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

5. Bimbingan Teknis dan Persiapan Penyelesaian Temuan BPK Atas LKPP tahun 2021

KPKNL Padang bekerja sama dengan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan negara melaksanakan Bimbingan Teknis dan Persiapan Penyelesaian Temuan BPK RI atas LKPP Tahun 2021. Acara dihadiri oleh satuan kerja yang berada di wilayah KPKNL Padang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan dalam menghadapi pemeriksaan BPK diantaranya terkait tindak lanjut penyelesaian anomaly asset tetap, aset tak berwujud dan persediaan pada KPKNL Padang dan satker terkait.

6. Apresiasi dan Rapat Persiapan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2022

Pada awal tahun 2022 KPKNL Padang bersama KPKNL Bukuit Tinggi dan Kanwil DJKN RSK melaksanakan kegiatan Apresiasi dan Rapat Persiapan Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2022 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada kantor pertanahan di wilayah Sumatera Barat atas kontribusinya dalam program pensertipikatan BMN Berupa tanah Tahun 2021 dan memberikan piagam secara simbolis kepada satuan kerja. Selain itu juga untuk membahas program pensertipikatan BMN berupa Tanah Tahun 2022 untuk memitigasi resiko pelaksanaan tahun 2022.

7. Kemenkeu One Goes To Campus

KPKNL Padang bersama Kemenkeu One (Satu) dilingkup Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kegiatan Kemenkeu Goes to Campus di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat pada Bulan 23 Juni 2022 dengan mengusung tema “Mengenali, Memahami dan Menjaga Keuangan Negara”. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan awareness dan engagement generasi muda terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. Masing - masing Instansi Vertikal Kemenkeu Sumbar juga ikut memeriahkan

kegiatan tersebut yaitu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumbar, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sumbar dan Jambi, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Teluk Bayur dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dengan menyampaikan materi yang terkait dengan tupoksi dari masing-masing instansi.

ANALISIS ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja selama di tahun 2022 dianalisis dalam rapat dialog kinerja organisasi KPKNL Padang periode triwulan IV tahun 2022. Dalam rapat DKO tersebut, disampaikan reuiu capaian kinerja dengan nilai kinerja organisasi KPKNL Padang pada tahun 2022 adalah 114,79. Namun terdapat 1 (satu) buah IKU yang capaiannya kuning yaitu Persentase Kualitas Pengelolaan Anggaran dan 1 buah IKU yang capaiannya merah yaitu Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan. Hal ini disebabkan Terdapat Keterlambatan Data Kontrak Triwulan III yang disebabkan oleh lamanya respon pegawai KPPN terhadap kontrak yang diajukan dan sulitnya menyesuaikan realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana.

RENCANA AKSI ATAU MITIGASI RISIKO UNTUK TAHUN 2023

Memasuki tahun 2023 ini, KPKNL Padang bersiap membenahi organisasi dan menjalankan rencana aksi yang telah ditetapkan demi meningkatkan kinerja organisasi KPKNL Padang. Berikut mitigasi risiko dan rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Padang pada tahun 2022:

1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang. Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022, antara lain:

- Monitoring terhadap persetujuan pemanfaatan BMN;
- Melakukan pendampingan kepada Pengguna Barang maupun Mitra atas kesulitan dalam pemenuhan kelengkapan data/dokumen persyaratan untuk usulan ke Pengelola Barang;
- Penggalan Potensi PNBPN pada satker-satker potensial;
- Melakukan monitoring dan optimalisasi terhadap aset-aset dalam penguasaan Pengelola Barang agar dapat menghasilkan PNBPN;
- Permohonan lelang ulang aset PT Texmaco Group;
- Melakukan edukasi kepada Pemohon Lelang perihal jenis lelang selain yang telah pernah diajukan ke KPKNL beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan;
- Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan balik nama agar proses balik nama Pembeli Lelang tidak terdapat kendala;

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lelang DJKN/KPKNL agar lebih mengetahui tentang kelebihan-kelebihan pembelian melalui lelang DJKN/KPKNL;
 - Sosialisasi pengelolaan BMN kepada satuan kerja;
 - Melakukan penggalan potensi PNBPN pada satuan kerja;
 - Berkoordinasi dengan satuan kerja dan sinergi tim penilai dengan seksi PKN terkait BMN yang akan diajukan pemanfaatannya.
2. IKU Persentase Produktivitas Lelang, rencana aksi:
- Melakukan koordinasi terkait permohonan SKPT Online;
 - Melakukan penggalan potensi lelang Non Eksekusi Wajib BMN,
 - Melakukan penggalan potensi lelang UMKM,
 - Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Sumbar terkait rencana pelaksanaan lelang sitaan pajak secara serentak
3. IKU Persentase Realisasi Pokok lelang, rencana aksi:
- Melakukan penggalan potensi lelang UMKM;
 - Berkoordinasi dengan pemohon lelang baik dari pihak perbankan maupun Instansi Pemerintah dan PT.Pegadaian untuk menggali potensi lelang;
 - Melakukan penggalan potensi lelang Non Eksekusi Wajib BMN
 - Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan balik nama agar proses balik nama Pembeli Lelang tidak terdapat kendala
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai lelang DJKN/KPKNL agar lebih mengetahui tentang kelebihan-kelebihan pembelian melalui lelang DJKN/KPKNL
4. IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara. Rencana aksi:
- Peningkatan tahap pengurusan BKN
 - Sosialisasi crash program keruganan hutang
 - Meningkatkan tahap pengurusan minimal sampai dengan tahap penyampaian Surat Paksa
 - Memprioritaskan pengurusan piutang besar di atas 50 juta
 - Memperluas sosialisasi crash program dengan sarana medsos yang ada.Bekerja sama dengan penyerah piutang dalam melakukan penagihan
5. IKU Persentase Bidang tanah BMN yang disertipikatkan, rencana aksi:

- Melakukan koordinasi dengan satker yang menjadi target sertifikasi
- Melakukan percepatan koordinasi awal tahun dalam rangka persiapan Sertifikasi Tanah BMN Tahun 2023, baik ke Kantor Pertanahan maupun Satuan Kerja K/L yang memiliki jumlah target yang signifikan.
- Mengundang Rapat/Sosialisasi Satuan Kerja K/L dan Kantor Pertanahan dalam rangka monitoring percepatan usulan Sertifikasi Tanah BMN Tahun 2023
- Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Kanwil Pertanahan beserta satker terkait.
- Menginventarisir kembali bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat

6. IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, rencana aksi:

- Untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, yaitu secara aktif melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik vendor maupun internal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian
- Terus melakukan koordinasi dengan pemilik kegiatan dan melakukan monitoring secara berkala setiap usulan perencanaan kegiatan (konsistensi RPD)
- Melakukan revisi anggaran secara berkala untuk mendukung rencana kerja
- Melakukan monitoring terkait capaian output pada KPKNL Padang sehingga dapat dipastikan tercapainya output sesuai/dapat melampaui target.
- Meningkatkan sinergi dan kerja sama antar seksi serta memberi pemahaman bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya dibebankan kepada Subbagian Umum namun perlu kerja sama dari berbagai pihak agar risiko dapat dimitigasi.

REALISASI ANGGARAN

Pengukuran Capaian Output Belanja dan Penyerapan Anggaran KPKNL Padang

Pada tahun 2022, KPKNL Padang mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah revisi sebesar Rp2.366.295.000. Dan hingga akhir 2022, jumlah realisasi anggaran sebesar Rp2.278.290.821 atau total anggaran yang tersedia telah diserap sebesar 96%.

Tabel 21 Pagu dan Realisasi Belanja Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko KPKNL Padang

Jenis Belanja	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	% Realisasi Anggaran
Belanja Pegawai	-	-	-

Belanja Barang	1.869.503.000	1.799.181.860	96%
Belanja Modal	496.792.000	479.108.961	96%
Jumlah	2,366,295,000	2,278,290,821	96%

Persentase realisasi Belanja Non Belanja Pegawai secara keseluruhan adalah 96% dari pagu setelah revisi.

Alokasi dana DIPA TA. 2022 yang dipergunakan untuk mendukung seluruh kegiatan masing-masing seksi pada KPKNL Padang, terdiri dari berbagai output seperti di bawah ini:

- 1) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara
- 2) Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang
- 3) Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara
- 4) Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara
- 5) Risalah Lelang
- 6) Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)
- 7) Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset
- 8) Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)
- 9) Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara
- 10) Rekomendasi hasil Penilaian
- 11) Penggalan Potensi Lelang
- 12) Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan
- 13) Aset BUN yang Dikelola
- 14) Layanan Bantuan Hukum
- 15) Kerumahtanggaan
- 16) Layanan Perkantoran
- 17) Peralatan Fasilitas Perkantoran
- 18) Pembinaan/Edukasi Publik
- 19) Kehumasan
- 20) Rekomendasi Kepatuhan Internal

**DATA PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER RINCIAN OUTPUT
KPKNL PADANG
PER DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Rincian Output	Pagu Akhir	Realisasi Anggaran
4796. BMB.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	3.050.000	2.530.000
4796. BMB.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	3.346.000	3.240.000
4798.FAE.001	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	21.136.000	20.260.000
4798. AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	43.206.000	39.779.000
4798. AAH.003	Risalah Lelang	28.768.000	26.650.000
4798. AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	24.632.000	24.570.000
4798. AAH.005	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	11.024.000	10.700.000
4798. FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	13.904.000	13.800.000
4798. FAE.004	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	51.168.000	50.635.000
4798. FAE.006	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	3,548,000	3,450,000
4798. FAE.007	Rekomendasi Hasil Penilaian	7,200,000	7,000,000
4798. FAE.009	Penggalian Potensi Lelang	3,896,000	3,050,000
4798. FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	61,354,000	43,550,000
4700. EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	8,779,000	8,570,000
4701. EBA.994	Layanan Perkantoran	1,530,904,000	1,492,486,052
4701. EBA.002	Kerumahtanggaan	47,744,000	43,361,808
4701. EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	49,361,000	49,022,000
4701. EBB.004	Gedung/Bangunan	447,431,000	430,086,961
4702.BMB.002	Kehumasan	2,388,000	2,250,000
4702.EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	3,456,000	3,300,000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Padang Tahun 2022 merupakan suatu bentuk akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan kinerja KPKNL Padang dalam Tahun Anggaran 2022 yang disusun untuk memenuhi asas *good governance* serta mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang bebas KKN dimana setiap penyelenggara layanan publik wajib menyusun suatu laporan kinerja.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL) Padang merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara yang meliputi barang milik negara, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, supervisi atas pelaksanaan lelang dan lain sebagainya. Dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa PUPN tidak berwenang lagi menagih piutang BUMN karena pengelolaan harta dan kekayaan BUMN harus didasarkan pada praktik korporasi yang sehat sesuai UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, terjadi pengurangan yang cukup signifikan dalam luas lingkup tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan KPKNL Padang yang berkaitan dengan penagihan piutang yang berasal dari Bank BUMN. Demikian juga dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor SE-1/KN/2021 tentang Pengurusan Piutang Penyerahan Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengatur kembali kebijakan di bidang Piutang Negara terutama piutang yang tidak terkonsolidasi dalam laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam hal ini piutang penyerahan dari BPJS. Dengan terbitnya SE ini maka KPKNL/PUPN Cabang tidak dapat menerima penyerahan pengurusan piutang dari BPJS dan KPKNL/PUPN Cabang mengembalikan BKPN kepada BPJS selaku Penyerah Piutang.

Bermodalkan prestasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2018, KPKNL Padang terus meningkatkan dan mengembangkan diri menjadi unit pelayanan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di tahun 2021. Meskipun gagal meraih predikat ZI WBBM di tahun 2021 KPKNL Padang tetap berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang berharga bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara khususnya KPKNL Padang. Capaian kinerja yang telah diraih pada akhir tahun 2022, hambatan eksternal maupun internal diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas pegawai KPKNL Padang sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

Kami berharap penyusunan LAKIN KPKNL Padang Tahun 2022 ini dapat memberikan penjelasan secara mendalam kepada *stakeholder* terkait tugas dan fungsi KPKNL Padang. Kami menyambut baik setiap *feedback* dari semua pihak sehingga dapat secara proaktif ikut membangun pelayanan publik yang menerapkan asas *good governance* dan bebas KKN.

LAMPIRAN